PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kompas Hari: Kamis Tanggal: 26 Agustus 2010 Halaman: A

TEKNOLOGI INFORMASI

Penyedia Internet DIY Blokir Pornografi

YOGYAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 10 dari 18 perusahaan penyedia jasa internet atau *internet service provider* di DIY mulai menyediakan fasilitas pemblokiran situs-situs pornografi. Hal ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat dalam menekan penyalahgunaan internet untuk pornografi.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Wilayah I Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) DIY Taufik M Heriawan, dalam jumpa pers di Yogyakarta, Rabu (25/8). "Fasilitas pemblokiran pornografi ini sudah diterapkan sejak 17 Agustus dan sifatnya pilihan bagi para pelanggan," katanya.

APJII DIY merancang program pemblokiran sendiri yang dinamai DNS Merapi ITS Jogja, untuk sentralisasi pemblokiran perusahaan *internet service provider* (ISP) yang berbasis di DIY. Delapan ISP yang belum ikut serta disebabkan mereka merupakan perusahaan yang berbasis di Jakarta, seperti Telkom dan Indosat, yang memiliki program pemblokiran sendiri.

Program DNS Merapi itu bekerja menyaring situs-situs pornografi dari pengetikan alamat URL (*uniform resource locator*) situs. "Jika nama situs itu mengandung pornografi atau termasuk dalam daftar situs pornografi kami maka secara otomatis tidak akan bisa diakses," kata Taufik.

Namun, saat ini APJII DIY menggunakan server yang hanya optimal untuk menyaring 400.000 situs dari total dua juta situs pornografi di dunia maya. "Ke depannya, kami akan terus menambah performa server agar bisa menyaring lebih banyak situs pornografi," ujar Taufik.

Kelemahan lain yang akan terus diperbaiki adalah masuknya situs-situs nonpornografi dalam daftar blokir. Karena itu, APJII membuka akses kepada penggunaan layanan untuk memberi koreksi jika ada situs-situs semacam itu.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta juga berencana mewajibkan usaha warung internet di wilayahnya untuk memasang program pemblokiran situs pornografi. Aturan itu akan diwujudkan dalam bentuk peraturan wali kota, yang dikatakan Wakil Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, akan mulai diberlakukan 1 Oktober 2010.

Namun, program blokir yang akan dipakai adalah DNS Nawala, perangkat lunak yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini telah tersedia untuk diunduh gratis. DNS Nawala memiliki cara kerja serupa dengan DNS Merapi. (ENG)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005